

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA MIKRO KECIL (NON UMK)
RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO**

Badan Usaha

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNI); 2. Memiliki Passpor bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA); 3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum; 4. Memiliki NPWP bagi Pelaku Usaha Badan Hukum; 5. Memiliki Hak Akses OSS berupa username dan Password yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id;

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan

A. Bagan Alir Perizinan Non UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah – Orang Perseorangan



B. Kategori Pelaku Usaha



C. Langkah Pendaftaran hak Akses Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)

1. Kunjungi <https://oss.go.id/>
2. Pilih **DAFTAR**
3. Pilih **Skala Usaha Non UMK**
4. Pilih **Jenis Pelaku Usaha Non UMK**
5. Lengkapi **Formulir Pendaftaran**

6. Cek email Anda dan klik tombol **Aktivasi**
7. Cek email Anda untuk mengetahui **Username** dan **Password**
8. Pendaftaran **Berhasil**
9. Hak Akses Anda **siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS**

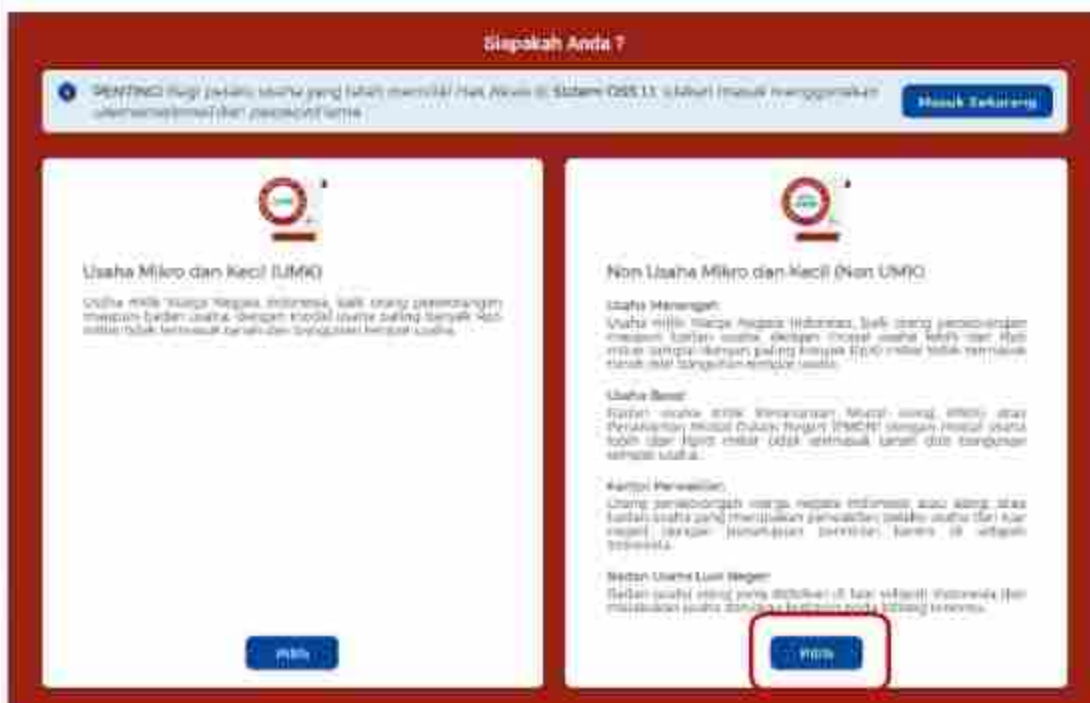
1. Kunjungi <https://oss.go.id/>



2. Pilih **DAFTAR**



3. Pilih **Skala Non UMK**



4. Pilih Jenis Pelaku Usaha Non UMK

Skala Usaha Anda adalah Non UMK

Jenis Pelaku Usaha

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Batal Lanjut

- Pilih Jenis Pelaku Usaha (Orang Perseorangan atau Badan Usaha)
- Lengkapi formulir pendaftaran yang tersedia

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran

Lengkapi data jika sebagai Non UMK (Badan Usaha)

Skala Usaha Anda adalah Non UMK

Jenis Pelaku Usaha

Nama Badan Usaha

Nomor NPTN

Data Pemilik

Alamat Usaha

Nomor SK Pengesahan / Surat

Alamat Email

Data Tambahan (Ditambah/Revisi)

NPWP

NIB

NIB/ST

Kategori

Jenis Usaha

Daftar

- Pilih Jenis Pelaku Usaha Badan Usaha
- Pilih Jenis Badan Usaha (PT, CV, Firma atau Persekutuan Perdata)
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Data Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan
 - b. NPWP Perusahaan
 - c. Nomor SK Pengesahan
 - d. Alamat Email
 2. Data Salah Satu Direksi/ Pengurus
 - a. Nomor Induk Kependudukan
 - b. Tanggal Lahir
 - c. Jabatan
 - d. Nomor Telepon Seluler
- Centang Kolom Pernyataan
- Klik tombol **Daftar**

6. Cek email Anda dan klik tombol **Aktivasi**

OSS

Terima kasih **WILDAH ALYANORA**!

Pendaftaran Nomor NIB Anda telah selesai. Silakan klik tombol Aktivasi di bawah ini untuk mengaktifkan akun Anda.

Nama User	WILDAH ALYANORA
Jenis/Nomor Identitas	KTP / 8270000000000000

Aktivasi

Maaf kami tidak dapat mengirim email ini ke alamat email Anda. Silakan hubungi kami jika Anda mengalami masalah.

Atas nama,

System@OSS - Kementerian Perindustrian

1000 OSS
@PusatOSS
Jalan Jenderal Sudirman No. 44
Jakarta 10110
Indonesia

D. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah – Badan Usaha

1. Pastikan Anda telah memiliki **Hak Akses**
2. Kunjungi <https://oss.go.id/>
3. Pilih **MASUK**
4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **Captcha** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**
5. Klik Menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Permohonan Baru**
6. Lengkapi **Data Badan Usaha**
7. Validasi **Kelengkapan Data Badan Usaha**
8. Lengkapi **Data Usaha**
9. Lengkapi **Data Detail Usaha**
10. Lengkapi **Data Produk /Jasa**
11. Periksa **Daftar Produk/Jasa**
12. Lengkapi **Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP)**
13. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha**
14. Periksa dan Lengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)**
15. Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**
16. Periksa **Draf Perizinan Berusaha (NIB)**
17. **Perizinan Berusaha** terbit

1. Pastikan Anda telah memiliki **Hak Akses**

Hak akses berupa **username** dan **password** yang dikirimkan ke **e-mail** yang dicantumkan pada saat pendaftaran



2. Kunjungi <https://oss.go.id/>



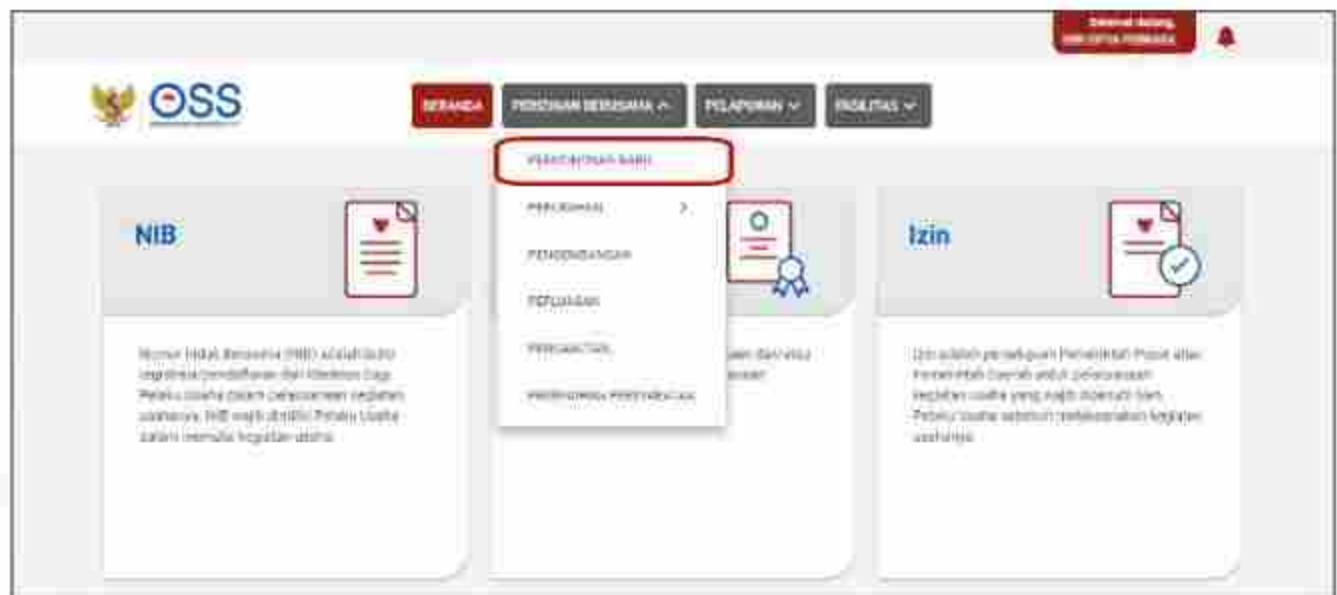
3. Pilih **Masuk**



4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**



5. Klik Menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Pemohonan Baru**



6. Lengkapi Data Pelaku Usaha

- Lanjutkan langkah berikutnya sesuai dengan jenis Badan Usaha Anda, dengan kondisi berikut:
 - a) Jika berjenis **Perseroan Terbatas (PT)**, maka lanjut ke **langkah 6.a**
 - b) Jika berjenis **Persekutuan Komanditer/CV**, maka lanjut ke **langkah 6.b**
 - c) Jika berjenis **Persekutuan Firma**, maka lanjut ke **langkah 6.c**
 - d) Jika berjenis **Persekutuan Perdata**, maka lanjut ke **langkah 6.d**
 - e) Jika berjenis **Koperasi**, maka lanjut ke **langkah 6.e**
 - f) Jika berjenis **Persyarikatan/Persekutuan**, maka lanjut ke **langkah 6.f**
 - g) Jika berjenis **Yayasan**, maka lanjut ke **langkah 6.g**
 - h) Jika berjenis **Perusahaan Umum (Perum)**, maka lanjut ke **langkah 6.h**
 - i) Jika berjenis **Badan Layanan Umum**, maka lanjut ke **langkah 6.i**
 - j) Jika berjenis **Badan Hukum Lainnya**, maka lanjut ke **langkah 6.j**
- Setelah **langkah 6 (sesuai kondisi masing-masing)** sudah dilengkapi, Anda dapat lanjut ke **langkah 7**.

Berikut merupakan salah satu contoh input data pelaku Usaha (badan usaha)

- Perseroan Terbatas (PT)



- Sistem akan menampilkan data Badan Usaha yang **tertarik dari sistem AHU Online** khusus untuk jenis usaha **PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi**.
- Sedangkan data Badan Usaha untuk **jenis usaha lainnya** harus melalui **proses perekaman (isi secara manual)** dalam sistem.
- Data yang **harus Anda lengkapi**:
 1. Masa Berakhir Legalitas
 2. Alamat Badan Usaha PT
 3. Kecamatan
 4. Kelurahan/Desa
 5. RT/RW
 6. Kode Pos
 7. Email Badan Usaha PT
 8. NPWP Badan Usaha PT
 9. Nomor Telepon
- Sistem akan menampilkan data secara **otomatis**:
 1. Nama Badan Usaha PT
 2. Jenis Badan Usaha
 3. Status Badan Hukum
 4. Jangka Waktu PT
 5. Status Penanaman Modal PT
 6. Provinsi
 7. Kabupaten/Kota
- Klik tombol **Tarik Ulang Data AHU** untuk menampilkan **data paling terbaru yang terdaftar** dalam sistem AHU Online.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat



- Sistem akan menampilkan form Tarik Data AHU secara **otomatis**:
 1. Jenis Perusahaan
 2. Nama Perusahaan
 3. Nomor Identitas
- Periksa **kesesuaian data** yang tertera, lalu klik tombol **Simpan Data**.
- Jika terdapat **data yang tidak sesuai**, segera hubungi **Notaris** Anda.

8. Lengkapi Data Usaha



- Klik tombol **TAMBAH BIDANG USAHA** terlebih dahulu.
- Sistem akan menampilkan **Formulir Perekaman Data Pelaku Usaha (Badan Usaha)**.
- Lalu klik tombol **PILIH BIDANG USAHA**.



- Sistem akan menampilkan **Formulir Pemilihan Bidang Usaha**
- Data yang **harus Anda pilih**:
 1. Jenis Kegiatan Usaha (Pilih **Utama** atau **Pendukung** atau **Kantor Cabang** atau **Pendukung UMKU**)
 2. Bidang Usaha (Jika **termasuk ketentuan BUPM**, maka akan muncul pilihan dan **pilih kegiatan pada bidang usaha sesuai KBLI** yang tertera.)
 3. Uraian Bidang Usaha (**terisi otomatis**)
 4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Klik tombol **SIMPAN**.

Catatan:

Pelaku Usaha dapat mengecek nomor KBLI melalui <https://bss.go.id/informasi/kbi-terbuka-risiko>

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasal, Mulaik, Cerp

9. Lengkapi Data Detail Usaha

- Lengkapi **formulir detail usaha** sesuai dengan keterangan yang ada. **Lanjutkan** langkah berikutnya **sesuai dengan keberadaan lokasi kegiatan usaha Anda**, dengan kondisi berikut:
 - a) Jika lokasi kegiatan usaha berada di **darat**, maka lanjut ke **langkah 9.a**
 - b) Jika lokasi kegiatan usaha berada di **hutan**, maka lanjut ke **langkah 9.b**
 - c) Jika lokasi kegiatan usaha berada di **laut**, maka lanjut ke **langkah 9.c**
- Setelah **langkah 9 (sesuai kondisi masing-masing)** sudah dilengkapi, Anda dapat **lanjut ke langkah 10**.

Jika pilih "Lokasi kegiatan usaha" di DARAT

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Pembelian dan Pematangan Tanah
 - Bangunan / Gedung
 - Mesin / Peralatan Dalam Negeri
 - Mesin / Peralatan Impor
 - Mesin / Peralatan (**terisi otomatis**)
 - Investasi Lain-Lain
 - Total Modal Tetap (**terisi otomatis**)
 - Modal Kerja 3 Bulan
 - Total Nilai Investasi (**terisi otomatis**)
- Klik tombol **VALIDASI RISIKO**, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko.

- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Deskripsi Kegiatan Usaha
 - Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
 - Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
 - Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
 - Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (**otomatis terisi**)
 - Jumlah Tenaga Kerja Asing
- Klik tombol **TAMBAH PRODUK/JASA** (lanjut ke **langkah 10**).

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Jika pilih "Lokasi kegiatan usaha" di HUTAN

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya? (Jika **Sudah**, akan **muncul formulir** yang berisi Nama Penerbit Izin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit)
 - Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini? (Jika **Ya**, akan **muncul kolom NPWP** dan isilah dengan 15 digit nomor NPWP yang sesuai)
 - Nama Usaha / Kegiatan
 - Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? (**Jika ada**) (Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian **proyek kedua dan seterusnya** ketika mengajukan **lebih dari 1 bidang usaha/KBLI**)
 - Lokasi Kegiatan Usaha
 - Apakah sudah memiliki (IPPK/Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan/Pemanfaatan Kawasan Hutan/Konservasi Kawasan Hutan sebelumnya?) (Jika **Sudah**, akan **muncul formulir** yang berisi Nomor, Lampiran File, Tanggal Terbit, Tanggal habis masa berlaku)

7. Jenis Perizinan lokasi Hutan yang dibutuhkan:
- Jika pilih **Penggunaan / Pelepasan**, akan **muncul pilihan** yang berisi Jenis (**Penggunaan / Pelepasan**) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?, Apakah lokasi yang dimohonkan dalam wilayah kerja Perum Perhutani?
 - Jika pilih **Pemanfaatan / Konservasi**, akan **muncul pilihan** yang berisi Jenis (**Pemanfaatan / Konservasi**) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Luas Lahan Usaha Satuan

Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini? Ya Tidak

Apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota? Ya Tidak

Keterangan:
 Lahan kegiatan pada zona yang terdapat rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
 Contoh:
 1. Apakah diperlukan dalam satu kabupaten/kota di provinsi
 atau Provinsi lain (di Provinsi lain)
 2. Apakah dalam satu kabupaten/kota di provinsi lain
 kabupaten/kota lain (di Provinsi lain)

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Luas Lahan Usaha dan Satuannya
 - Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini?
 (Jika **Ya**, akan **muncul formulir pilihan** terkait **Bangunan** dan **pilih yang sesuai**)
 (Jika **Milik Sendiri**, akan **muncul formulir Detail Bangunan** seperti **jumlah bangunan, PBG/IMB, dan SLF** di bagian setelah pengisian lokasi usaha, lalu **lengkapi yang sesuai**)
 - Apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota?

Nama Usaha

Provinsi

Kabupaten / Kota

Kecamatan

Kelurahan / Desa

Kode Pos

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Alamat Usaha
 - Provinsi
 - Kabupaten / Kota
 (Jika **Kabupaten/Kota yang terpilih ada Kawasan**, akan **muncul pilihan** terkait **Apakah lokasi usaha berada di Kawasan?** dan **Nama Kawasan**, lalu pilih yang sesuai.)
 - Kecamatan (jika ada)
 - Kelurahan / Desa (jika ada)
 - Kode Pos

Data Investasi untuk Bidang Usaha

Pembelian dan Pematangan Tanah

Bangunan / Gedung

Mesin / Peralatan Dalam Negeri

Mesin / Peralatan Impor

Mesin / Peralatan (terisi otomatis)

Investasi Lain-Lain

Total Modal Tetap (terisi otomatis)

Modal Kerja 3 Bulan

Total Nilai Investasi (terisi otomatis)

- Data yang harus Anda lengkapi:
 - Pembelian dan Pematangan Tanah
 - Bangunan / Gedung
 - Mesin / Peralatan Dalam Negeri
 - Mesin / Peralatan Impor
 - Mesin / Peralatan (**terisi otomatis**)
 - Investasi Lain-Lain
 - Total Modal Tetap (**terisi otomatis**)
 - Modal Kerja 3 Bulan
 - Total Nilai Investasi (**terisi otomatis**)
- Klik tombol **VALIDASI RISIKO**, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko.

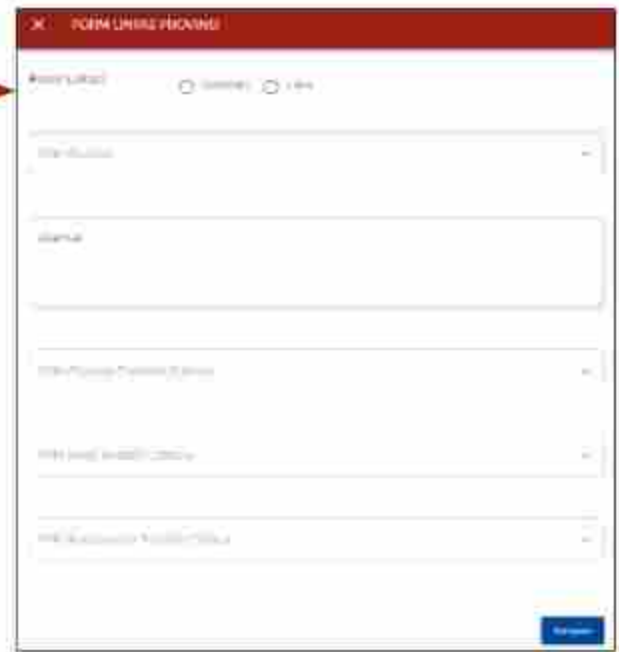
- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Deskripsi Kegiatan Usaha
 2. Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
 3. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
 4. Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
 5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (**otomatis terisi**)
 6. Jumlah Tenaga Kerja Asing
- Klik tombol **TAMBAH PRODUK/JASA** (lanjut ke **langkah 10**).

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di LAUT

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya?
(Jika **Sudah**, akan **muncul formulir** yang berisi Nama Penerbit Izin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit)
 2. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?
(Jika **Ya**, akan **muncul kolom NPWP** dan isilah dengan 15 digit nomor NPWP yang sesuai)
 3. Nama Usaha / Kegiatan
 4. Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? (**Jika ada**):
(Pertanyaan ini akan muncul pada **pengisian proyek kedua dan seterusnya** ketika mengajukan **lebih dari 1 bidang usaha/KBLI**)
 5. Lokasi Kegiatan Usaha
 6. Apakah atas lokasi dan kegiatan yang diajukan telah memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang?
(Jika **Ya**, akan **muncul formulir** yang berisi Nomor, Lampiran File, Tanggal Terbit, Tanggal habis masa berlaku)

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Luas/Panjang Perairan yang diperlukan dan Satuannya
 2. Kedalaman Lokasi dan Satuannya
 3. Rencana Luas Bangunan dan Satuannya
 4. Apakah perusahaan melakukan reklamasi?
 5. Nama Perairan
 6. Provinsi
(Akan **muncul kolom Proyek Strategis Nasional** pada beberapa **Provinsi tertentu**. Lalu, jika pilih '**Ya**' termasuk **Proyek Strategis Nasional**, akan **muncul** kolom selanjutnya yang berisi **Pilih Daftar Proyek Strategis Nasional** dan **Upload Rekomendasi Proyek Strategis Nasional (opsional)**)
 7. Koordinat
(Unggah **file koordinat Polygon** dalam bentuk **excel**)
 8. Apakah lokasi lintas provinsi?



- Jika pilih **Ya** pada pertanyaan **'Apakah lokasi lintas provinsi?**, maka akan **muncul data lintas provinsi beserta alamatnya.**
- Klik tombol **Tambah Provinsi** untuk menambahkannya.
- Sistem akan menampilkan **Form Lintas Provinsi** dan data yang harus Anda lengkapi:
 1. Posisi Lokasi (Pilih lintas **Daratan** atau **Laut**)
 2. Provinsi
 3. Alamat
 4. Kabupaten / Kota
 5. Kecamatan
 6. Kelurahan

Undang-Undang Cipta Kerja
Parti Mudah Zaman



- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Pembelian dan Pematangan Tanah
 2. Bangunan / Gedung
 3. Mesin / Peralatan Dalam Negeri
 4. Mesin / Peralatan Impor
 5. Mesin / Peralatan (**terisi otomatis**)
 6. Investasi Lain-Lain
 7. Total Modal Tetap (**terisi otomatis**)
 8. Modal Kerja 3 Bulan
 9. Total Nilai Investasi (**terisi otomatis**)
- Klik tombol **VALIDASI RISKI**, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko.



- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Deskripsi Kegiatan Usaha
 2. Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
 3. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
 4. Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
 5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (**otomatis terisi**)
 6. Jumlah Tenaga Kerja Asing
- Klik tombol **TAMBAH PRODUK/JASA** (lanjut ke **langkah 10**).

Undang-Undang Cipta Kerja
Parti Mudah Zaman

10. Lengkapi Data Produk/Jasa



- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Jenis Produk/Jasa
(Jika pilih "**Lainnya**", akan **muncul kolom free text** dan **isi** sesuai **produk/jasa** yang dilakukan pada **bidang usaha/KBLI** terpilih.)
 2. Kapasitas (per Tahun)
 3. Satuan Kapasitas
- Klik tombol **SIMPAN**.

11. Periksa Daftar Produk/Jasa



- Sistem akan menampilkan data:
 1. Kapasitas
 2. Satuan
 3. Jenis Produksi

- Tetapi, jika **lokasi usaha** berada **di dalam Kawasan**, akan **muncul Pernyataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lokasi Kawasan**, lalu klik **kotak centang/checkbox** pada **disclaimer** yang tertera.



- Klik tombol **SELESAI**.

Undang-Undang Cipta Kerja

12. Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP)



- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Apakah perusahaan Anda akan melakukan impor Barang sendiri?
(Jika **Ya**, akan **muncul pilihan Angka Pengenal Importir (API)** dan **pilih yang sesuai**)
 2. Apakah perusahaan Anda memiliki nomor virtual account (BPJS Kesehatan)?
(Jika **Ya**, **isi nomor virtual account BPJS Kesehatan**)
 3. Apakah perusahaan Anda memiliki Nomor Pendaftaran Perusahaan (BPJS Ketenagakerjaan)?
(Jika **Ya**, **isi nomor Pendaftaran Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan**)
 4. Apakah Perusahaan Anda memiliki Nomor WLKP?
(Jika **Ya**, **isi nomor Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan/WLKP**)

Proses perizinan akan **tetap bisa dilanjutkan** walaupun Pelaku Usaha **belum memiliki** BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ataupun nomor WLKP.

- Klik **kotak centang/checkbox**
- Klik tombol **SELANJUTNYA**.

Undang-Undang Cipta Kerja

- Jika pilih **Sudah**, akan **muncul kolom pilihan** dan pilihlah **jenis dokumen** persetujuan lingkungan yang dimiliki.
- Klik tombol **LANJUT**, untuk ke langkah selanjutnya (**langkah 15**) tanpa melalui proses pemilihan parameter

- Jika pilih **Belum**, sistem akan menampilkan konfirmasi **"Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan"** yang harus Anda pilih **berdasarkan KBLI/Bidang Usaha** terpilih.
- Klik tombol **LANJUT**.

- Jika Anda **belum memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan**, maka data yang harus Anda lengkapi:
 1. **Parameter Lingkungan**, pilihlah kondisi parameter yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
(Kemudian sistem akan **menampilkan jenis kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi**, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)
 2. **Uraian Usaha**, isilah sesuai dengan uraian kegiatan usaha yang dilakukan.
- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

15. Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**

4.	Jangka waktu penyelesaian	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	1. NIB → Usaha Resiko Rendah 2. NIB + Sertifikat Standar → Usaha Resiko Menengah Rendah
7.	Sarana / Prasarana / Fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi AC; 2. Loker Pelayanan Front Office; 3. Loker Pelayanan Informasi dan Penyerahan Izin; 4. Alat tulis kantor; 5. Meja dan Kursi; 6. Komputer dan Printer; 7. Telepon; 8. Lemari Dokumen; 9. Scanner dan Fotocopy; 10. Internet (Wi-fi); 11. Kotak saran, pengaduan dan IKM; 12. Kursi roda; 13. Televisi; 14. Media Informasi Touchscreen; 15. Website dan Email;
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Mampu Mengoperasikan Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
9.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
10.	Pengawasan internal	Dilaksanakan secara terus-menerus oleh : 1. Atasan langsung secara berjenjang 2. Pejabat Fungsional dan Struktural 3. Tim Audit Internal
11.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPSTSP Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jln. Merdeka No. 83 Selatpanjang. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via: Telepon/fax : (0763) 33630 Hp/wa : 082283677312 Email: dpmpstspkabmeranti@gmail.com Website: dpmpstsp.merantikab.go.id Fb : DPMPSTSP kepulauan meranti Instagram : dpmpstspkabmeranti
12.	Jaminan pelayanan	1. Didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima. 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya. 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System. 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Melayani Dengan Sepenuh Hati
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat - Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat - Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik) 3. Petugas pelaksana pelayanan diberikan reward sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan punishmen apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada Tanggal : 08 Agustus 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

H. SUTARDI, S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
19660929 198603 1 009